



3

Impian Pendatang, Tantangan Pendataan: Upaya Memahami Silang Sengkarut Kependudukan di Episentrum Pariwisata Lombok Utara

R. G. Erwinsyah & Delfirman

A. Mencatat di Antara Beragam Masalah: Pengantar

“Ke Gili Trawangan? Mau wisata ya?” Begitu kira-kira tanggapan sebagian kolega yang mendengar rencana kajian Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) di Gili Trawangan, yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Hal itu tentu wajar mengingat begitu populernya pulau ini sebagai destinasi wisata kelas wahid, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia internasional. Pertanyaan yang muncul kemudian, apakah ada masalah sosial dan pendataan penduduk di sana? Pertanyaan

R. G. Erwinsyah & Delfirman

Badan Riset dan Inovasi Nasional, Jakarta, *e-mail*: rudy006@brin.go.id

© 2023 Badan Riset dan Inovasi Nasional

Erwinsyah, R. G. & Delfirman. (2023). Impian pendatang, tantangan pendataan: upaya memahami silang sengkarut kependudukan di episentrum pariwisata Lombok Utara. Dalam M. A. Humaedi, D. K. Imron, & A. Pramono (Ed.), *Mencatat untuk Membangun Negeri Narasi Emik Registrasi Sosial Ekonomi Jilid 1 Indonesia Tengah-Timur* (59–100). Penerbit BRIN. DOI: 10.55981/brin.775.c696 ISBN: 978-623-8052-94-3 E-ISBN: 978-623-8052-98-1

ini dijawab rekan BPS Kabupaten Lombok Utara dengan sangat menenangkan, “Gili Trawangan memang tempat paling menarik dan banyak tantangan serta masalah (baik dari pendataan maupun kependudukan)”. Tim peneliti kemudian memutuskan untuk fokus melakukan penelusuran kegiatan pendataan penduduk di pulau itu. Kajian pada bab ini menceritakan fenomena yang ada di Lombok Utara, cerita perjuangan pendataan dan permasalahan sosial yang ada di pulau impian wisatawan, dan ditutup dengan sebuah refleksi dari pengalaman singkat bergumul dengan pendataan. Ada pembelajaran dalam proses pendataan di tengah masalah kependudukan.

Kehadiran tim peneliti di lapangan bertujuan memotret secara kualitatif dan menghasilkan narasi emik dari kegiatan Regsosek. Tim peneliti sadar akan pentingnya melepas kacamata negara, atau jika meminjam istilah antropolog James C. Scott, peneliti perlu untuk mengabaikan cara pandang seperti negara (*seeing like a state*), meskipun peneliti memiliki status sebagai Aparatur Sipil Negara. Menurut Scott (1998), negara selalu menjalankan proyeknya dengan simplifikasi, di mana negara berusaha menyederhanakan realitas yang kompleks agar mudah diatur dan dikontrol. Negara dengan ideologi birokrasi *high-modernism* mencoba memaknai kesejahteraan dari pengetahuan yang dianggap “saintifik”, seperti data statistik, indeks, indikator, dan bilangan angka yang diharapkan memacu pertumbuhan pembangunan. Pandangan positivistik ini cenderung abai terhadap realitas sosial yang kompleks karena negara memandang masyarakat sebagai target pembangunan layaknya tabula rasa, sebuah kanvas kosong yang dapat ditulis, diciptakan, dan dibangun dari nol sesuai kehendak penyelenggara negara (Ferguson, 1990).

Kontrol demografi masyarakat sebagai determinasi infrastruktur dapat ditelusuri melalui pemikiran Marvin Harris (1979) mengenai materialisme kultural. Ia tidak puas dengan konsep Marx mengenai mode produksi dalam infrastruktur sehingga ia menambahkan konsep mode reproduksi, yakni komponen dan tata-cara reproduksi aspek-aspek produksi. Dalam hal ini, kontrol demografi atau kependudukan sehingga secara garis besar tataran infrastruktur materialisme kultural

Harris dapat dipahami dalam wujud teknologi, ekologi, dan demografi. Data demografi inilah yang dapat menjadi alat mengonstruksikan identitas dan realitas sosial (Tishkov, 2005).

Masih dengan napas akademis yang senada, Tania Murray Li (2005) mencoba mengaitkan konsep *high-modernism* Scott dengan *governmentality* dari Michel Foucault. Dalam konsep *governmentality*, kekuasaan dan pemerintahan dioperasikan melalui tata cara dan teknologi birokrasi modern berupa standardisasi serta pengukuran dalam segala hal, seperti pemetaan, angket, sensus, dan survei. Foucault (1980) merumuskan bahwa mesin utama *governmentality* dimotori ilmu-ilmu pengetahuan bernuansa etik yang digunakan untuk mendukung logika kekuasaan. Di sini Scott (1998) dan Li (2007) hadir dengan sebuah solusi untuk mengatasi monopoli negara terhadap pembangunan, yakni dengan menghadirkan suara-suara emik untuk mengimbangi pandangan etik negara, dengan memberikan ruang bagi kelompok-kelompok masyarakat yang dimarginalkan untuk bersuara.

Dalam konteks Indonesia modern, wacana yang patut diperbincangkan bukan lagi perkara bagaimana data demografi digunakan dalam implementasi program, melainkan pada tataran yang lebih hulu lagi, yakni bagaimana data tersebut diproduksi. Jika meminjam pandangan Foucault (1980) terhadap pengetahuan, data adalah salah satu unsur pengetahuan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari kekuasaan. Sosiolog Elad Segev (2019) lebih lanjut memahami Foucault dengan memandang data mengarah pada pengetahuan, dan pengetahuan mengarah pada kekuasaan untuk bertindak dan menentukan realitas yang dijalani. Dalam hal ini, peneliti juga harus memperlakukan data sebagai yang terhubung langsung dengan kekuasaan, dan bersikap kritis terhadap pengetahuan yang dihasilkan sejak proses produksi hingga implikasinya. Hulu proses bisnis data ialah bagaimana data tersebut dikumpulkan sehingga harus ditelisik sejak dari proses produksinya.

Regsosek sebagai sebuah proyek pendataan nasional dianggap sebagai titik balik implementasi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Presiden RI telah mengamanatkan secara

langsung pelaksanaan Regsosek dalam pidato kenegaraan yang mengindikasikan urgensi pelaksanaannya. Regsosek sendiri adalah upaya pemerintah untuk membangun data kependudukan tunggal. Dengan menggunakan data tunggal, pemerintah dapat melaksanakan berbagai programnya secara terintegrasi, tidak tumpang tindih, dan lebih efisien. Data Regsosek dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas berbagai layanan pemerintah, seperti pendidikan, bantuan sosial, kesehatan, hingga administrasi kependudukan.

BPS Provinsi NTB dan Kabupaten Lombok Utara mengetahui dengan jelas posisi strategis dan urgensi pelaksanaan Regsosek ini, dan berusaha untuk menjalankannya sesuai dengan prosedur yang sudah disepakati. Namun, fakta di lapangan tentunya ada banyak hambatan dan kendala yang dihadapi. Saat peneliti tiba di BPS Provinsi NTB terlihat kesibukan di dalam kantor karena sedang adanya rilis bulanan statistik provinsi. Di luar *business as usual* yang dilakukan tersebut, BPS Provinsi dan Kabupaten secara paralel tetap dapat menjalankan mandat untuk melaksanakan Regsosek, tentunya butuh komitmen dan konsolidasi yang solid dari pusat ke daerah untuk dapat menjalankannya.

Dalam pelaksanaan Regsosek, pemerintah daerah dan desa memiliki wewenang melakukan pemutakhiran data karena pemerintah setempat yang paling mengerti kondisi komunitasnya. Pemutakhiran dalam Regsosek bersifat *bottom up*, yaitu dari kepala desa yang mendapatkan data secara *door to door*. Hal ini dilakukan agar pemerintah desa mendapatkan data warga mana saja yang harus dibantu di daerahnya. Data ini akan didiskusikan dan diputuskan melalui Badan Permusyawaratan Desa. Tata kelola pemutakhiran data ini perlu dibangun untuk menjamin keberlanjutan data dan harus terstandarisasi di seluruh daerah. Selain itu, perlu peningkatan kapasitas daerah sebagai pelaksana pemutakhiran data. Penyerahan kepercayaan terhadap unit pemerintahan terkecil ini sebenarnya adalah sebuah bentuk dari pengakuan negara mengenai adanya keinginan dari masyarakat untuk maju sesuai dengan harapan dan

potensinya (Li, 2007), walaupun sebenarnya masih banyak rekognisi dan penyerahan mandat lain yang belum terakomodasi.

Data yang dihasilkan dalam Regsosek dapat digunakan pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan dan menghapus kemiskinan ekstrem. Sekitar 5,59 juta jiwa atau 2,04% pada tahun 2022 masih tergolong dalam kategori kemiskinan ekstrem (TNP2K, 2022) dan membutuhkan intervensi segera dari pemerintah. Beberapa wilayah di Indonesia masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) adalah salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Hal tersebut berdasarkan data kemiskinan yang dirilis BPS bahwa persentase penduduk miskin NTB saat ini sebesar 13,68%, masih jauh di atas rata-rata nasional. Persentase kemiskinan tertinggi NTB berada di Kabupaten Lombok Utara dengan 27,04% pada Maret 2021 (BPS Nusa Tenggara Barat, 2022). Dalam konteks sejarah pendataan di Indonesia, Pulau Lombok adalah wilayah yang masih memiliki catatan lengkap sensus penduduk pada jaman pendudukan Jepang (Tukiran, 2000).

Kabupaten Lombok Utara merupakan wilayah yang memiliki beragam potensi, terutama alamnya yang berupa pegunungan dan pesisir pantai. Pulau Gili Trawangan yang begitu tersohor di dunia pun ada di wilayah paling muda di Provinsi NTB ini. Namun, ternyata ada berbagai paradoks pembangunan yang terjadi. Segala potensi alam dan kekayaannya belum dapat digunakan sebagai pemicu peningkatan kesejahteraan masyarakat, terlihat dari persentase kemiskinan yang masih tinggi. Kegelisahan seperti ini disebut Michael L. Ross, seorang pakar ekonomi-politik, sebagai *resource curse* (Ross, 1999), di mana daerah yang memiliki potensi dan kekayaan alam besar tetapi justru masyarakat tidak mampu memperoleh hasilnya untuk peningkatan kesejahteraan. Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh dimensi ekonomi dan politik dalam suatu wilayah.

Kehadiran Regsosek diharapkan dapat menjadi landasan dan pemacu bagi penurunan angka kemiskinan dan penghapusan angka kemiskinan ekstrem di Provinsi NTB, khususnya di Kabupaten Lombok Utara. Pengambilan kebijakan berdasarkan bukti berupa

angka statistik dan data *by name by address* yang akurat serta peran pemerintah daerah dianggap akan menjadi penentu bagaimana data akan menjadi titik pertama penyelesaian berbagai permasalahan sosial. Semoga.

B. Bentang Alam Lombok Utara: Puncak Gunung, Pantai, dan Pulau-Pulau Kecil

Perjalanan menuju Kabupaten Lombok Utara dari Kota Mataram dapat ditempuh sekitar satu hingga dua jam dengan menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat. Dua jalur yang dapat ditempuh, yaitu melalui Jalan Raya Senggigi yang merupakan pesisir pantai atau melalui jalan baru melewati Gunung Pusuk. Ibu kota kabupaten ada di Kecamatan Tanjung, sekitar satu jam dari ibu kota provinsi. Kabupaten Lombok Utara memiliki lima kecamatan, yaitu Kecamatan Pemenang, Tanjung, dan Gangga, yang sebagian besar wilayahnya berada di pesisir. Lalu, Kecamatan Bayan dan Kayangan yang lebih dominan wilayah pegunungan karena berada di kaki Gunung Rinjani. Puncak Gunung Rinjani dengan Danau Segara Anak yang sangat indah itu pun berada di wilayah Kecamatan Bayan.

Selain wilayah Bayan, Kecamatan Pemenang menjadi salah satu kecamatan yang diunggulkan sebagai daerah pariwisata di Kabupaten Lombok Utara. Di wilayah ini ada objek wisata berupa pesisir pantai yang sangat indah yang melintang sepanjang Jalan Raya Senggigi hingga wilayah Desa Malaka, Pemenang Barat, Pemenang Timur, Menggala dan yang paling menjadi primadona adalah Desa Gili Indah. Keindahan dan potensi alam wilayah ini membentang mulai dari sisi kiri dengan kilauan pantai dan sisi kanan dengan hamparan hijaunya gunung. Sayangnya, di balik keindahan dan gemerlap pariwisata, ada permukiman warga yang jauh dari kata megah apalagi mewah. Sesuai dengan angka statistik BPS, wilayah ini masih menjadi lokasi dengan masyarakat yang tergolong miskin.

Menyeberang dari Pulau Lombok, ada tiga pulau kecil yang berjejer ke arah barat. Desa Gili Indah merupakan satu-satunya wilayah di Kabupaten Lombok Utara yang berada di luar Pulau Lombok. Ada

Jumlah penduduk Desa Gili Indah tercatat 1.463 KK atau 4.865 jiwa, dengan mayoritas berada di Dusun Gili Air, sedangkan di Dusun Gili Trawangan tercatat ada 595 KK. Secara jumlah, penduduk di Desa Gili Indah tergolong sedikit jika dibandingkan dengan penduduk di Kecamatan Pemenang yang pada tahun 2021 berjumlah 40.571 jiwa (BPS Kabupaten Lombok Utara, 2022a), apalagi jika dibandingkan dengan jumlah penduduk di Kabupaten Lombok Utara, yaitu 247.000 jiwa. Kepala Dusun Gili Trawangan menerangkan, saat ini bahkan hanya sekitar 400 KK yang masih bertempat tinggal di Gili Trawangan, selebihnya sudah menetap dan memiliki tempat tinggal di daratan (Pulau Lombok), terutama Kota Mataram.

Tabel 3.1 Jumlah Penginapan dan Kedai Makanan di Kecamatan Pemenang

No.	Desa	Warung/ Kedai Makanan	Hotel	Hostel/Motel/ Losmen/Wisma
1	Malaka	127	6	2
2	Pemenang Barat	20	0	1
3	Pemenang Timur	36	0	3
4	Gili Indah	120	9	99
5	Menggala	8	0	0
Kec. Pemenang		311	15	105

Sumber: BPS (2021)

Tabel 3.1 menggambarkan sumber ekonomi masyarakat yang terkait dengan aktivitas pariwisata. Kegiatan ekonomi utama Desa Gili Indah adalah sektor jasa dan niaga terutama dalam bidang pariwisata. Hal ini dapat terlihat dari jumlah minimarket, toko, rumah makan, warung, hotel, dan losmen yang sangat banyak. Lokasi usaha penyedia jasa pariwisata Kabupaten Lombok Utara bahkan sebesar 81,35% berada di Desa Gili Indah (BPS Kabupaten Lombok Utara, 2022b). Sektor ekonomi lainnya adalah perkebunan, terutama perkebunan kelapa, sedangkan sektor dan komoditas lainnya tergolong sangat minim. Namun, dengan jumlah penduduk yang sedikit, wilayah Desa Gili Indah merupakan penyumbang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

terbesar di Kecamatan Pemenang, bahkan salah satu yang terbesar di NTB, dengan realisasi PBB mencapai lebih dari Rp1,5 miliar pada tahun 2021.

Gili Trawangan, Pulau Impian Pendatang

Di antara ketiga Gili, Gili Trawangan memang yang dapat dikatakan paling maju secara ekonomi dan menjadi pusat wisata Desa Gili Indah (Dodds dkk., 2010; Partelow, 2021). Pulau ini memperlihatkan jajaran hotel yang sangat atraktif, ditambah restoran dan kafe selayaknya di Pulau Bali. Wisatawan asing berlalu-lalang, mulai dari orang Eropa, Asia Timur, India, Amerika, Australia, dan sedikit wisatawan lokal bercampur di sini, di pulau yang luasnya sekitar 340 ha. Gili Trawangan adalah pulau terluar di Desa Gili Indah yang menjadi pusat kegiatan ekonomi dan pariwisata, tetapi pusat pemerintahan Desa Gili Indah ada di Pulau Gili Air yang merupakan wilayah terdekat dari pulau utama (Pulau Lombok).

Wilayah Gili Trawangan dapat ditempuh dengan menggunakan kapal penumpang dari Pelabuhan Bangsal, Kecamatan Tanjung, dengan waktu tempuh kurang lebih 40 menit. Banyak warga di kapal yang membawa sayuran dan barang-barang kebutuhan sehari-hari, kebanyakan untuk dijual kembali di desa karena makin minimnya lahan yang digunakan untuk bercocok tanam. Kemudian, ada alat transportasi lain antar pulau dari Gili Air yang dikenal dengan nama *Island Hopping*. Kapal ini hanya memiliki dua kali jadwal keberangkatan tiap harinya, yaitu pagi hari pukul 09.30 dan sore hari pukul 15.00.

Petugas pendata melakukan perjalanan dengan memanfaatkan transportasi antarpulau, baik di Pulau Gili Air maupun Gili Trawangan (Gambar 3.2). Suasana di dalam perahu memperlihatkan bahwa transportasi penyeberangan antarpulau terkait dengan aktivitas keseharian warga (Gambar 3.3). Selain digunakan warga untuk menyeberang antarpulau, *Island Hopping* juga yang biasa digunakan wisatawan untuk berpindah pulau, dari Gili Air-Gili Meno-Gili Trawangan atau sebaliknya. Dengan *Island Hopping*, masyarakat atau



Foto: Rudy (2022)

Gambar 3.2 Pulau Gili Air dan Gili Trawangan



Foto: Rudy (2022)

Gambar 3.3 Perahu Penyeberangan ke Desa Gili Indah

wisatawan dapat berpindah dengan waktu tempuh sekitar 20 menit antarpulau. Jarak antar pulau sebenarnya cukup dekat, tetapi kapal harus mengambil jalan agak memutar karena menghindari gelombang atau ombak yang besar di sekitar pulau. Ombak ini lah yang menjadi salah satu daya tarik Gili Indah dan banyak menjadi objek untuk kegiatan berselancar bagi wisatawan mancanegara.

Menurut kepala Dusun Gili Trawangan, jumlah wisatawan yang datang setiap hari ke Gili Trawangan saat ini (tahun 2022) mencapai kurang lebih 600–800 orang tiap harinya. Namun, jumlah itu masih jauh dari angka tertinggi kunjungan wisatawan Gili Trawangan yang

secara rata-rata pernah mencapai 3.000 orang per hari hingga tahun 2017, sebelum terjadi gempa Lombok tahun 2018 dan pandemi COVID-19 tahun 2020–2021. Dua kejadian tak terduga ini sempat memukul telak para pelaku usaha dan pekerja pariwisata Gili Trawangan (Partelow, 2021). Banyak dari usaha mereka yang harus gulung tikar, masyarakat setempat pun harus kembali meladang dan melaut untuk memenuhi kebutuhan makan tiap hari, sedangkan pendatang memutuskan untuk kembali ke daerah asal. Sekarang, Gili Trawangan sedang berusaha bangkit kembali.

Majunya pariwisata di wilayah Gili Indah, khususnya Gili Trawangan memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar dengan terbukanya lapangan pekerjaan di bidang pariwisata dengan menjadi staff di hotel, restoran/kafe, *tour guide*, jasa *diving* dan *snorkeling*, penyewaan sepeda, penyewaan kapal dan lainnya. Mayoritas masyarakat bekerja di jasa wisata, tetapi masih ada juga yang berkebun dan menjadi nelayan.

Menurut penuturan Wak Haji Rudik, sesepuh desa sekaligus salah satu penghuni pertama, penduduk pertama di Gili Trawangan sebenarnya adalah petani dan nelayan. Mereka datang ke Gili Trawangan mulai tahun 1970-an tepatnya tahun 1973, di mana pelaut keturunan Bugis dan Mandar menyeberang menuju Gili Indah. Saat itu, ada Perang Praya di Pulau Lombok yang menyebabkan beberapa penduduk di Pulau Lombok harus mengungsi ke Pulau Gili dan bertahan hidup dengan menggarap tanah. Oleh karena itu, mayoritas penduduk di Desa Gili Indah umumnya adalah suku bangsa Sasak dan keturunan suku bangsa Bugis serta Mandar. Kondisi tanah di tiga Gili sebelum berkembangnya sektor pariwisata tergolong subur dan cocok untuk bercocok tanam segala jenis tumbuhan, mulai dari sayur, kelapa, hingga padi tumbuh subur di sini.

Pariwisata di Gili Trawangan mulai berkembang sekitar tahun 1980-an, di mana *homestay* mulai tumbuh satu per satu untuk menjadi akomodasi orang yang sedang berkunjung. Kepala desa menceritakan ketika masa kecil ia mengingat cerita bahwa awalnya orang datang ke Gili Trawangan bukan untuk tujuan berwisata tetapi melakukan

penelitian, terutama mengenai penyakit demam berdarah yang banyak terjadi di pulau ini pada tahun 1980-an. Selain itu, ada juga penelitian mengenai keanekaragaman biota laut yang ada di Gili Trawangan dan dari sana lah orang mulai menyadari adanya potensi alam yang sangat besar (Hampton & Hampton, 1998). Cerita mengenai Gili Trawangan kemudian mulai berkembang dari mulut ke mulut, terutama di luar negeri.

Pariwisata Gili Trawangan mulai meningkat secara drastis sejak tahun 2008. Sekitar 70% wisatawan adalah wisatawan asing, terutama dari Inggris dan Australia (Dodds dkk., 2010). Gili Trawangan saat itu juga diuntungkan dengan peraturan yang memperbolehkan wisatawan dari Bali dapat langsung menuju Gili Trawangan tanpa harus menuju Lombok terlebih dulu. Selain dikenal sebagai pulau pusat hiburan malam, Gili Trawangan terkenal karena wisata baharinya, terutama keindahan pemandangan bawah lautnya, yaitu karang biru (*blue coral*) (Hampton & Hampton, 2009). Karang biru yang hanya ada dua di dunia menjadi daya tarik utama. Mayoritas wisatawan datang untuk *diving* atau *snorkeling* untuk dapat melihat keindahannya secara langsung.

Selain itu, daya tarik yang coba dipertahankan di Gili Trawangan adalah aturan mengenai pelarangan penggunaan kendaraan bermotor, kecuali dalam kondisi darurat yang diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara. Gili Trawangan memiliki aturan khusus untuk menjaga keamanan pulau yaitu hukum adat lokal yang disebut *awik-awik*. Aturan ini berfungsi untuk memberikan hukuman secara langsung kepada masyarakat atau turis yang melanggar sehingga tercipta rasa aman bagi para pendatang dan penduduk setempat.

Tantangan Pendataan di Pulau Impian

Desa Gili Indah sebagai wilayah destinasi wisata mancanegara, khususnya di wilayah Gili Trawangan menghadapi fenomena sosial berupa mobilitas penduduknya yang sangat tinggi. Mobilitas penduduk yang tinggi ini menyebabkan sulitnya mendapatkan angka pasti jumlah penduduk yang menetap. Banyaknya pendatang yang bekerja datang

dan pergi ke Gili Trawangan menjadi sebuah tantangan tersendiri dalam pendataan.

Pendatang tersebut biasanya bekerja sebagai staf di hotel atau restoran/kafe dan menyewa tempat tinggal sementara berupa indekos atau kontrakan selama bekerja, tetapi ada juga yang memilih untuk pergi-pulang menggunakan kapal dari perusahaan. Mereka datang dari berbagai tempat menuju pulau kecil bernama Gili Trawangan, tidak hanya dari Pulau Lombok, tetapi juga dari seluruh wilayah di Indonesia. Sekitar 60% pekerja merupakan pendatang dari wilayah di luar Gili Trawangan. Selain itu, rata-rata status pekerja hotel/restoran/kafe di Gili Trawangan adalah karyawan magang atau kontrak/tidak tetap sehingga menyebabkan makin tingginya pendatang yang silih berganti.

Di sisi lain, pekerjaan di luar bidang pariwisata akhirnya menjadi kurang diminati karena nilai ekonomisnya dinilai kurang menjanjikan dibanding pendapatan dan karir yang mereka jalani di bidang pariwisata. Pariwisata di Gili Trawangan seolah menjadi lahan kepemilikan bersama (Hardin, 1968) yang dapat digarap oleh semua orang, dengan apapun wujud dan caranya. Hal itu yang terjadi saat perekrutan Petugas Pendataan Lapangan (PPL) dan Petugas Pemeriksaan Lapangan (PML) untuk kegiatan Regsosek di Gili Trawangan sehingga BPS harus merekrut tenaga PPL dan PML yang tidak berasal dari masyarakat setempat.

Ada tiga orang yang ditugaskan sebagai PPL untuk kegiatan Regsosek 2022 di Gili Trawangan, yaitu Bang Anto, Bang Redi, dan Bang Wawan, serta satu orang sebagai PML, yaitu Bang Abdul. Ketiga pejuang data ini bukan warga setempat, tetapi didatangkan dari daratan (Pulau Lombok), khususnya Kecamatan Pemenang. Cerita mengenai ketiga PPL akan disajikan pada bagian berikutnya. “Di sini kami lebih sulit ke rumah warga, karena tidak begitu dikenali warga, walaupun sudah menggunakan tanda pengenal Regsosek”, ungkap salah satu petugas pendata. Hal ini tentu memberikan banyak tantangan dalam proses pencacahan ke masyarakat, berbeda dengan petugas yang berasal dari SLS setempat, yang akan lebih memudahkan dalam koordinasi dan penerimaan warga.

Salah satu tantangan lain dari petugas pendataan di Gili Trawangan adalah akses menuju pulau yang harus ditempuh menggunakan kapal penumpang, dengan ongkos sebesar Rp20.000,00 untuk sekali jalan atau Rp40.000,00 pergi-pulang (PP). Petugas PPL mengungkapkan bahwa mereka sering kali harus mengakali ongkos transportasi ini dengan menumpang kapal karyawan perusahaan yang menyeberang tiap harinya pada pukul 07.30, dengan bekal kenalan awak kapal. Para PPL Gili Trawangan memutuskan untuk menyewa indekos dengan ukuran sekitar 3×3 meter sebagai tempat bermukim mereka bertiga ketika harus melakukan pencacahan. Pilihan ini diambil untuk menghindari kegiatan *commuting* pergi-pulang setiap hari yang menghabiskan waktu, tenaga, dan biaya. Dengan kontrakan yang hanya cukup untuk merebahkan badan, para PPL beristirahat dan berlindung dari panasnya wilayah pantai di siang hari yang dapat mencapai 36°C dan dinginnya angin laut di malam hari. Namun, sering kali mereka juga harus keluar pada malam hari untuk menemui responden yang hanya dapat ditemui di waktu malam karena sibuk bekerja di pantai dari pagi hingga sore hari.

Selain itu, peraturan lokal di Gili Trawangan tidak memperbolehkan adanya kendaraan bermotor kecuali di saat *urgent* sehingga alat transportasi utama adalah sepeda dan cidomo (kereta kuda). Namun, tingginya harga sewa sepeda, yaitu sekitar Rp50.000,00/hari,



Foto: Rudy (2022)

Gambar 3.4 Berjalan Kaki Mengitari Pulau

menyebabkan para PPL tidak memiliki pilihan lain selain mengitari pulau yang panas terik ini setiap hari dengan berjalan kaki, dari satu RT ke RT lainnya (Gambar 3.4), di mana ada tujuh RT di Gili Trawangan dengan konsentrasi penduduk di RT 04, 05, dan 07. Sering juga PPL harus kembali dengan tangan hampa karena tidak dapat menemui responden yang masih sibuk bekerja. Akhirnya, para PPL menyesuaikan kondisi masyarakat dengan melakukan pencacahan di malam hari, sejak setelah maghrib hingga maksimal pukul 22.00 Wita.

C. Menelisis Pemahaman Proses Bisnis Awal Registrasi

Pendataan awal Regsosek yang dilakukan secara serempak di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota di Indonesia merupakan wujud komitmen pemerintah terhadap data yang terintegrasi di Indonesia, khususnya yang akan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program nasional tentunya tidak mudah untuk dijalankan. Publik sudah sering mendengar kegagalan lembaga pemerintah maupun non-pemerintah dalam memberikan data akurat dan terpercaya sebagai landasan pembuatan kebijakan (*evidence based policy*) dan penyaluran program bantuan sosial.

BPS merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab atas penyediaan kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat, sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Dalam menjalankan tanggung jawab ini, BPS selalu berupaya meningkatkan kemampuan dan menciptakan keunggulan kompetitif dalam menyelenggarakan survei dan sensus penduduk di Indonesia. BPS didukung dengan sistem yang sudah *established*, infrastruktur yang memadai, anggaran yang tepat, dan sumber daya manusia yang sudah terstruktur hingga satuan lingkungan setempat/SLS terkecil (RT/dusun).

Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui kantor BPS Provinsi NTB saat ini juga sedang melakukan pelaksanaan pendataan awal Regsosek, serentak dengan provinsi lainnya, mulai dari tanggal 15

Oktober hingga 14 November 2022. BPS Provinsi NTB dan BPS Kabupaten Lombok Utara sangat memahami urgensi dan posisi BPS sebagai *leading sector* pelaksanaan Regsosek. BPS Provinsi NTB dan BPS Kabupaten Lombok sangat mendukung tujuan utama Regsosek untuk melakukan integrasi data sosial ekonomi penduduk. Selama ini, memang dirasakan ada tumpang tindih data yang sifatnya sektoral, misalnya dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Kementerian Sosial RI. Data yang dihasilkan Regsosek ini diharapkan akan menjadi satu-satunya acuan untuk memberikan berbagai macam bantuan sosial atau acuan pembuatan kebijakan bagi kepentingan masyarakat.

Kabupaten Lombok Utara sebagai wilayah paling muda di Provinsi NTB tentu membutuhkan berbagai macam data statistik yang digunakan untuk pengambilan kebijakan oleh pemangku kebijakan di daerah. Kabupaten Lombok Utara saat ini tercatat sebagai daerah dengan persentase kemiskinan tertinggi di Provinsi NTB, dengan persentase kemiskinan yang masih cukup jauh di atas rata-rata Provinsi NTB serta rata-rata nasional. Persentase kemiskinan di Kabupaten Lombok Utara memang masih tinggi, tetapi sebenarnya sudah makin membaik karena cenderung turun dari tahun-tahun sebelumnya. Persentase kemiskinan Kabupaten Lombok Utara saat baru berusia dua tahun (2010) mencapai 43,14%.

Menurut Kepala BPS Kabupaten Lombok Utara, ada banyak faktor yang menyebabkan masih tingginya persentase kemiskinan di sana, salah satunya faktor budaya masyarakat di NTB, khususnya Lombok Utara, yang memiliki pola konsumsi makan yang kurang memenuhi standar, misalnya dalam pemenuhan batas asupan kalori harian. Hal ini terkait faktor kebiasaan masyarakat yang kurang memperhatikan asupan gizi dalam makanannya. Pengeluaran untuk konsumsi pun tergolong rendah dibandingkan daerah lain, belum lagi masih rendahnya pengetahuan tentang pentingnya makanan sehat dan berkualitas bagi perkembangan anak, yang dapat menjadi pemicu *stunting*. Hal ini perlu menjadi perhatian dan ditangani oleh pemerintah daerah.

BPS Kabupaten Lombok Utara sangat mendukung dan siap melaksanakan segala program pendataan di masyarakat, termasuk Regsosek. Regsosek akan sangat membantu pengambilan keputusan dan kebijakan, serta memberikan gambaran mengenai kondisi masyarakat di Kabupaten Lombok Utara yang membutuhkan bantuan program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan. Perangkat BPS Kabupaten Lombok Utara pun bersiap dengan mengikuti kegiatan pelatihan petugas Regsosek. Kegiatan ini diselenggarakan dalam tiga gelombang, mulai dari 2–8 Oktober 2022 di Kota Mataram.

Kabupaten Lombok Utara dikenal sebagai wilayah tujuan pariwisata di Provinsi NTB, dalam skala nasional hingga internasional. Tentunya menjadi sebuah paradoks apabila pada kenyataannya segala kekayaan dan keindahan alam tersebut belum dapat dinikmati dampaknya secara merata untuk masyarakat Kabupaten Lombok Utara. Tingginya persentase penduduk yang tergolong miskin dan segala masalah sosial lainnya perlu dipecahkan dalam jangka waktu yang tidak lama. Data statistik yang akurat dan berkesinambungan yang diproduksi oleh BPS menjadi prasyarat utama menuju masyarakat Kabupaten Lombok Utara yang lebih sejahtera.

Dalam proses pendataan awal, Kabupaten Lombok Utara mengalami beberapa hambatan dan kesulitan di lapangan. Setiap kecamatan memiliki tingkat kesulitannya masing-masing, mulai dari Pemenang, Tanjung dan Gangga di pesisir hingga Bayan dan Kayangan di wilayah pegunungan. Namun, BPS Kabupaten Lombok Utara melalui Seksi Statistik Sosial tetap berusaha menjalankan kegiatan pendataan awal Regsosek 2022 dengan usaha yang maksimal agar menghasilkan data yang berguna bagi pemerintah, baik di pusat maupun daerah.

Regsosek merupakan program terbaru pemerintah dalam hal pendataan penduduk. Karena itu, dapat dimaklumi jika masyarakat, khususnya di Kabupaten Lombok Utara, belum menerima informasi secara keseluruhan mengenai manfaat dan tujuan dari proses pendataan ini. BPS selaku pelaksana program pun membutuhkan upaya dan waktu yang tidak sedikit untuk memberikan pemahaman yang sama dari mulai pimpinan hingga pelaksana pendataan di lapangan

mengenai visi dan misi Regsosek 2022. Hal ini diperlukan agar tidak ada perbedaan persepsi antar pelaksana yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. Proses konsolidasi ini terus diupayakan melalui berbagai macam pertemuan dari tingkat nasional hingga kabupaten/kota.

Salah satu titik awal untuk kelancaran pendataan Regsosek ialah memastikan bagaimana masyarakat mendapat informasi. BPS Kabupaten Lombok Utara sudah melakukan koordinasi secara terstruktur hingga Satuan Lingkungan Setempat (SLS) yang terkecil, yaitu RT/Dusun, melalui para Koordinator Sensus Kecamatan (Koseka) dan juga Koordinator Statistik Kecamatan (KSK). Secara umum, sosialisasi Regsosek sudah dilakukan ke masyarakat di Kabupaten Lombok Utara melalui berbagai macam saluran, terutama adalah melalui masjid/musala di desa atau dusun. Cara ini dianggap yang paling efektif, tidak hanya di Kabupaten Lombok Utara, tetapi juga secara umum di Provinsi NTB, mengingat mayoritas masyarakat beragama Islam dan masjid/musala menjadi pusat informasi serta aktivitas bagi warga masyarakat.

Pelaksanaan Regsosek kali ini dirasa berbeda dengan survei BPS yang menggunakan sistem sampel. Pada Regsosek sasaran pendataan adalah 100% penduduk sama seperti sensus. Petugas pendata atau PPL memang diutamakan harus warga setempat, agar lebih mudah dikenali warga dan mengenali medan lapangan. Rekrutmen petugas pun dilakukan dengan mendapatkan rekomendasi dari kepala desa/dusun setempat.

Selain itu, penggunaan sistem informasi berbasis digital sudah digunakan sepenuhnya pada pendataan awal Regsosek ini. Petugas pendata selalu menggunakan gawainya berupa ponsel pintar saat berada di rumah warga. Hal ini ternyata dilakukan untuk menginput beberapa data ke aplikasi yang sudah disiapkan oleh BPS. Data tersebut berupa lokasi, foto dan keterangan lainnya yang akan berguna untuk proses pengolahan data nantinya. Literasi yang tinggi dalam penggunaan teknologi 4.0 memang dibutuhkan dan menjadi syarat petugas di lapangan. Awalnya, petugas mengalami beberapa kendala terutama secara teknis, tetapi sedikit demi sedikit dapat teratasi.

D. Antara Nilai Positif dan Tantangan dalam Mendata

Kondisi alam dan masyarakat di Kecamatan Pemenang cukup beragam dan memberikan tantangannya masing-masing. Di wilayah Desa Malaka terjadi bencana tanah longsor saat pendataan awal Regsosek dilaksanakan sehingga menyulitkan petugas untuk melakukan proses pencacahan warga. Kemudian, Dusun Teluk Kombal, di Desa Pemenang Barat, merupakan wilayah rawan bencana banjir karena permukaan air laut yang naik. Wilayah ini adalah wilayah yang tergolong kumuh dan padat, walaupun berada di perlintasan daerah wisata Jalan Raya Senggigi dan juga dekat dengan jalur penyeberangan ke Gili Trawangan.

Penduduk di Gili Indah dikenal memiliki mobilitas yang tergolong tinggi. Orang datang dan pergi untuk bekerja dan mencari penghidupan. Masyarakat di desa ini lebih mirip dengan karakter masyarakat perkotaan dibandingkan perdesaan karena sejak pagi sudah pergi bekerja hingga sore atau bahkan malam hari, mungkin hanya dapat ditemui saat istirahat atau pulang kerja. PPL terkadang perlu datang berkali-kali ke rumah warga, tetapi tidak jarang warga tidak ada di rumah (Gambar 3.5). PPL mengalami kesulitan saat berusaha menemui warga pada saat siang hari. Selama menyusuri



Foto: Rudy (2022)

Gambar 3.5 PPL tidak dapat menemui warga yang sudah didatangi berkali-kali.

gang-gang yang beralaskan tanah berpasir dan debu, beberapa kali PPL harus kecewa karena tidak ada orang yang dapat ditemui di rumah. Kalaupun ada warga yang dapat ditemui, tidak semua bersedia untuk didata.

Pada saat pagi/siang hari memang lebih sulit menemui warga Gili Trawangan karena kebanyakan warga sedang berada di pantai untuk menunggu tamu atau sekadar bersosialisasi dan berbagi informasi. Pencacahan tidak dapat dilakukan ketika warga tidak sedang berada di rumah karena proses administratif dan teknis *tagging* yang harus dilakukan di lokasi. PPL sering kali harus melakukan pencacahan di malam hari ketika warga sudah kembali dari pekerjaan mereka di pantai.

Kendala lain yang dihadapi pendata adalah banyaknya warga yang sudah pindah, terutama ke Kota Mataram atau sekitar Lombok. Kepala Dusun menerangkan bahwa sekitar 30% masyarakat sudah pindah domisili tetapi masih beralamat Gili Trawangan. Hal ini dikarenakan banyak warga yang sudah mapan secara ekonomi dan akhirnya membeli rumah lain dan menetap di Kota Mataram. Warga hanya sesekali saja pulang ke Gili Trawangan. Pola mobilitas penduduk seperti itu sudah banyak terjadi, terutama sekitar 10 tahun terakhir, yang merupakan dampak dari meningkatnya sektor pariwisata di Gili Trawangan.

Atas kondisi tersebut, target pencacahan yang dipatok sekitar 15 orang per hari dirasa sangat sulit untuk dipenuhi. Faktanya, hanya sekitar 4–5 orang per hari yang sanggup didapatkan. Jika sedang beruntung dan ditambah melakukan pencacahan di malam hari, mereka dapat memperoleh sedikit lebih banyak data dari biasanya. Pengalaman dalam melakukan pendataan sangat dibutuhkan untuk melakukan pencacahan Regsosek karena diperlukan keterampilan pendekatan kepada warga. Para PPL mengaku sudah mendapatkan pelatihan terlebih dahulu. Pelatihan inilah yang menjadi bekal PPL dalam menjalankan tugas, baik dari sisi teknis, seperti cara mengisi kuesioner, menggunakan aplikasi, hingga melakukan wawancara ke

warga, maupun materi yang sifatnya substantif mengenai tujuan dan fungsi pendataan.

Ketika di lapangan, PPL merasakan bahwa data kependudukan yang ada masih dirasa kurang lengkap dan kurang akurat, seperti data warga yang dipakai sebagai *pre-list* adalah data kependudukan tahun 2015 sehingga kondisi masyarakat sudah banyak berubah, baik yang sudah pindah domisili, meninggal, maupun melahirkan. Jadi, Regsosek ini adalah sebuah upaya yang memang harus dilakukan pemerintah untuk mendapatkan data yang lebih nyata, dan PPL sangat siap untuk melaksanakan tugas negara tersebut untuk kepentingan bersama.

Dusun Gili Trawangan memiliki karakteristik masyarakat yang agak berbeda dengan dusun lainnya di Kecamatan Pemenang karena tingkat kesibukan masyarakatnya yang bekerja terutama di sektor pariwisata. Istilah *time is money* sangat berlaku di dusun ini. Masyarakat terfokus untuk “memburu dolar” sehingga dukungan warga untuk kegiatan kemasyarakatan memang dirasa cukup minim. Masyarakat sulit untuk digerakkan agar dapat berpartisipasi, apalagi menjadi bagian dari proses pendataan tersebut.

Pendataan Regsosek dirasa sangat diperlukan oleh desa, khususnya di Gili Trawangan. Dengan lokasi geografis yang tidak berada di pulau utama (Lombok), pendataan di Desa Gili Indah memang dapat dikatakan tidak sering dilakukan, hanya pada saat pemilu atau pilkada saja biasanya diadakan pendataan warga. Itu pun sifatnya hanya data domisili keluarga. Beberapa keluarga masih ada yang tergolong tidak mampu secara ekonomi. Menurut keterangan kepala dusun, ada sekitar 20 keluarga yang masuk kategori miskin. Mereka adalah penduduk awal Gili Trawangan yang sudah tinggal di pulau ini selama puluhan tahun, dan sudah memiliki kartu identitas dengan alamat setempat. Bantuan pun pernah diterima oleh keluarga ini. Oleh karena itu, pemerintah desa melalui kepala dusun memandang perlu untuk selalu mendata warganya, terutama yang membutuhkan penyaluran bantuan sosial dan program jaminan sosial lainnya.



Foto: Rudy (2022)

Gambar 3.6 Pendataan Masyarakat Kurang Mampu

Selain adanya masyarakat yang tergolong kurang mampu (Gambar 3.6), ada beberapa masalah sosial lainnya di Gili Trawangan, seperti masalah kepemilikan lahan, di mana ada sengketa antara warga dan pemerintah daerah dan perusahaan besar berskala nasional. Dengan banyaknya masalah sosial, diperlukan adanya basis data yang kuat dan akurat sebagai landasan pengambilan keputusan atau kebijakan di desa.

Masyarakat sebagai subjek pendataan tentunya memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang utuh mengenai pendataan yang akan dilakukan. Adanya penipuan dan kejahatan lainnya yang mengatasnamakan survei atau pendataan kerap kali terdengar oleh masyarakat. Namun, ternyata data yang dikumpulkan disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu, yang mengakibatkan makin rendahnya kepercayaan masyarakat atas kegiatan pendataan. Inilah yang ditemui saat melakukan pendataan di Gili Trawangan. Selain itu, ada persepsi yang kuat dari masyarakat bahwa pendataan sama dengan pemberian bantuan sosial. Banyak dari masyarakat yang mengharapkan bantuan ketika didata. Beberapa masyarakat bahkan menolak untuk didata dengan alasan tidak pernah mendapat bantuan.

Hal-hal inilah yang kerap dijumpai ketika melakukan pendataan Regsosek, tidak hanya di Gili Trawangan tetapi pastinya di banyak tempat lain di Indonesia. Literasi masyarakat yang masih belum cukup tinggi untuk memaknai proses pendataan dan tujuannya tentu perlu untuk ditingkatkan. Nenek Kemasin adalah salah satu contoh masyarakat yang sangat awam dengan proses pendataan penduduk. Ibu yang berprofesi sebagai pemulung botol plastik dan beling ini mengaku baru pertama kali didata seperti Regsosek. Nenek Kemasin mengaku sebenarnya tidak tahu untuk apa didata, tetapi tetap bersedia memberikan jawaban sesuai pertanyaan petugas. “Saya lupa apa aja (yang ditanya), baru kali ini rasanya didata seperti ini”, ungkap Nenek Kemasin.

Minimnya peran serta masyarakat di Gili Trawangan memang menjadi permasalahan tersendiri. Sikap acuh tak acuh terhadap proses pendataan tidak dapat dipungkiri dan menjadi tugas rumah pemerintah desa. Masalah minimnya peran masyarakat ini tidak hanya terjadi pada saat pendataan, tetapi juga dalam kegiatan kemasyarakatan lainnya, seperti pertemuan warga yang biasanya hanya dihadiri beberapa warga saja. Menurut keterangan salah satu tokoh masyarakat setempat, sikap yang cenderung tertutup dari masyarakat ini memang sudah terjadi sejak dulu, bahkan sebelum pariwisata di Gili Trawangan berkembang. Selain itu, jauhnya kantor pemerintah desa dari Gili Trawangan juga menjadi faktor kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan desa. Aksesibilitas masyarakat terhadap informasi dan pelayanan dari desa perlu diperhatikan agar pemerintah desa dirasakan kehadirannya dalam kehidupan masyarakat Gili Trawangan.

E. Dukungan Kelembagaan Lokal dalam Pendataan

“Di Gili Trawangan ini, saya kumpulkan warga untuk pertemuan, datang 10–20 orang saja sudah syukur alhamdulillah,” ucap kepala dusun menceritakan betapa sukarnya mengumpulkan warganya. Kepala dusun mengungkapkan bahwa kesibukan warga dalam mencari uang dalam sektor pariwisata di pulau ini membuatnya kesulitan jika

mengadakan pertemuan yang harus dihadiri banyak orang. Kegiatan Regsosek 2022 ini misalnya, meskipun sudah disampaikan kepada para ketua RT dan juga melalui *WhatsApp Group* Warga Dusun Gili Trawangan, tetapi menurut beliau masih banyak warga yang belum menerima informasi apalagi paham mengenai kegiatan pencacahan ini.

Meskipun begitu, tentu tetua wilayah berusaha semaksimal mungkin untuk mendukung kegiatan pendataan dengan memosisikan diri sebagai “jembatan” antara petugas pendata dan masyarakat. Sosiolog Jan Breman (1980) mengungkapkan bahwa sejak era kolonial, elite desa selalu memainkan perannya sebagai jembatan di desanya dan antardesanya dengan daerah di luar desanya. Dalam posisi ini, kepala dusun dan ketua RT memberi dukungan, seperti mengumumkan ke warga, mengonfirmasi daftar warga, hingga mengantarkan PPL ke rumah-rumah warga. Kepala dusun dan ketua RT pun menyatakan siap menjadi mediator apabila ada warga yang salah paham atau tidak berkenan dikunjungi oleh petugas pendata.

Sementara itu, para PPL mengaku mengapresiasi sepenuhnya dukungan dari para perangkat desa. Namun, mereka sadar bahwa perangkat desa juga mempunyai pekerjaan dan kesibukan masing-masing sehingga mereka tidak dapat bergantung 100%. Dalam beberapa kesempatan, mereka kesulitan meminta banyak waktu dengan ketua RT sehingga akhirnya hanya meminta konfirmasi data warga saja. PPL kemudian berkeliling sendiri untuk melakukan pencacahan. PPL mengaku bahwa akan meminta bantuan ketua RT jika ada warga yang betul-betul sulit ditemui atau menolak diwawancarai saja. Dukungan ketua RT dirasa sudah cukup membantu pekerjaan pendataan di Gili Trawangan.

Kemarin malam kami tunggu Pak RT belum pulang juga ke rumah karena pergi mancing. Sampai jam 11 malam itu baru dia pulang. Akhirnya kami diskusi dan ngobrol sambil makan ikan bakar, itulah keramahan orang sini. Sebenarnya [mereka] baik asalkan kita berlaku baik dan sopan dengan mereka,” ujar Bang Wawan (Wawancara Bang Wawan, 5 November 2022).

Perjuangan para PPL yang tak kenal lelah tentu membuat orang setempat menjadi bersimpati dan memberikan dukungan terbaik dalam menjalankan tugas pendataan. “Yang paling pertama, paling penting, itu tanda tangan dan cap kepala desa di surat tugas kami, itu yang membuat masyarakat yakin bahwa kami ini benar mendata dan bukan penipu,” ucap salah seorang PPL sambil memperlihatkan surat tugasnya. Menurutnya, surat dari BPS Kabupaten saja tidak cukup karena warga lebih percaya pada entitas pemerintah yang dekat dengan diri mereka, yakni pemerintah desa. PPL bercerita bahwa warga sering kali didatangi oleh orang yang mengaku melakukan pendataan, tetapi tidak mengantongi surat izin dari desa sehingga warga cukup kritis dan bersikap curiga dalam menerima orang asing yang mengaku sebagai pendata.

Selain meminta bantuan kepada perangkat desa, para PPL juga memanfaatkan jejaring kerabat dan pertemanan mereka di Gili Trawangan untuk memperlancar proses pencacahan. PPL meminta bantuan saudara dan teman mereka untuk diperkenalkan kepada tetangga yang tidak mereka kenal sehingga memperlancar proses perkenalan diri dan program Regsosek ini. Cara ini sangat membantu PPL dalam menghemat waktu dan tenaga sehingga tidak perlu banyak meyakinkan responden untuk bersedia didata. PPL mengakui bahwa meskipun sikap individualisme banyak ditemui di pulau ini, tetapi tak sedikit orang yang ramah dan mau membantu mereka melancarkan pekerjaan. “Kuncinya adalah kita memperbanyak teman dan kenalan karena suatu saat nanti kita akan dibantu, dan kita pun akan membantu mereka. Dan, ini bukan cuma soal uang saja,” ujar seorang PPL menutup ceritanya tentang pengalaman masa kerjanya bertahun silam di pulau ini.

F. Kisah Hidup Petugas Pendata

“Kalau di Gili Trawangan, PML dan PPL bukan orang Gili, tetapi dari pinggir (pesisir Lombok Utara) karena ibarat kata mereka di sana kerja dapat dolar, kalau ikut Regsosek dapatnya rupiah. Tidak ada yang mau”, ungkap Koseka Kecamatan Pemenang, Gili Trawangan,

pulau kecil yang boleh dikatakan sebagai ujung tombak pariwisata Lombok. Gili Trawangan merupakan salah satu area tersulit dalam melakukan pendataan. Tantangan ini bukan karena alasan klasik seperti akses geografis atau kualitas sumber daya manusia, melainkan hadir dari realitas sosial ribuan manusia yang memilih bergumul pada dunia wisata yang dianggap mendatangkan uang besar ketimbang bekerja sebagai pencari data. Warga sebagai responden saja sangat sukar ditemui, bahkan menolak diwawancara, terlebih jika ingin melibatkan warga sebagai petugas pendata.

Beberapa petugas pendata di Gili Trawangan ialah Bang Abdul (PML), Bang Anto (PPL), Bang Redi (PPL) dan Bang Wawan (PPL). Para PPL melakukan aktivitas sebagai pendata lapangan dengan menyusuri rumah-rumah warga. Setelah tiba waktu istirahat, para PPL dan PML beristirahat di rumah indekos sederhana yang digunakan Bang Anto, Bang Redi, dan Bang Wawan sebagai pondokan. Rumah kost seluas 3×3 meter ini sangat sederhana, hanya terdapat dua kasur kecil dan sebuah kipas angin untuk melawan panasnya hawa kepulauan.

“Kami mulai di pendataan rata-rata sejak sensus *long form*, sebelumnya lebih banyak kerja proyek”, terang PPL. Usia ketiga PPL



Foto: Rudy (2022)

Gambar 3.7 Bang Anto

ini sudah menginjak kepala tiga. Bang Anto (37 tahun) (Gambar 3.7) yang paling senior bercerita bahwa ia tertarik bertugas di Regsosek ini karena rasa penasarannya akan pendataan. “Kita kan pernah juga jadi responden, rasanya ingin begitu terlibat pendataan”, ungkap Bang Anto. Akan tetapi, hidupnya tentu tidak selalu mengenai perkara pendataan belaka. Bang Anto bercerita bahwa selepas pendidikan Madrasah Aliyah, ia langsung melanglang buana pergi dari kampungnya di Menggala ke berbagai tempat untuk mencari rezeki. Bang Anto pernah mengerjakan proyek bangunan di Bali, pengumpul besi tua di Jombang, hingga kerja kuli tambang batu mangan di Flores. “Saya kabur sebelum ijazah MA saya ambil,” kelakarnya.

Rupanya hidup membujang dan merantau ini membuat orang tuanya cemas di kampung halaman. Pria Sasak ini memutuskan pulang kampung untuk kemudian menikah pada awal dekade 2010-an. Pekerjaan di Gili Trawangan pun pernah dilakoni selama dua tahun. Bang Anto berkongsi dengan dua orang temannya membuka loket yang menjual tiket wisata dengan modal Rp100 juta per tahun. Bisnis ini cukup menjanjikan, walau pada akhirnya terpaksa digusur akibat penertiban ruang terbuka. Setelah bertahun-tahun bekerja di jalanan, Bang Anto memutuskan untuk bekerja kantor menjadi pegawai honorer pada tahun 2014 di Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Utara. Akan tetapi, bencana gempa Lombok pada tahun 2018 membuatnya terpaksa berhenti dari pekerjaannya untuk lebih fokus pada pemulihan kampungnya yang termasuk wilayah paling parah terdampak gempa.

Pengalaman pertama Bang Anto dalam pendataan adalah saat kegiatan Pemilu 2019. “Data itu masih semrawut, rancu begitu. Datanya kurang lah,” keluhnya waktu itu. Rasa penasaran akan pendataan membuatnya ingin makin terlibat sehingga Bang Anto bergabung menjadi petugas lapangan dalam Sensus Penduduk Long Form yang merupakan kegiatan lanjutan Sensus Penduduk 2020. Sementara itu, dalam Regsosek 2022 ini, Bang Anto langsung meminta ditempatkan di Gili Trawangan.

Selain karena waktu itu di Gili masih kosong petugasnya, saya juga ingin rasanya ikut berkontribusi membenahi pendataan di sana, yang memang sulit orang-orangnya. Saya merasa pendataan ini harusnya begini, seperti Regsosek ini. Karena apa... karena *door to door*, kita melihat langsung, kita foto, kita tandai titik lokasi (Wawancara Bang Anto, 4 November 2022).

Kisah berbeda selanjutnya dialami oleh Bang Redi (34 tahun) (Gambar 3.8). Setelah lulus Madrasah Aliyah, Bang Redi masih di kampungnya di Desa Menggala untuk membantu pekerjaan orang tua. Namun, melihat banyak kawan sekampungnya yang bekerja merantau keluar Bang Redi pun tertarik. Kerja menjadi buruh bangunan selama empat bulan di Bali nampaknya sudah cukup untuk membuatnya pulang. Setelah sempat bekerja sebagai buruh bangunan di Gili Air, Bang Redi mencoba mencari pekerjaan tetap dengan mengikuti pelatihan pariwisata di Balai Latihan Kerja selama satu tahun, termasuk magang di perhotelan selama empat bulan. Ia langsung bekerja di sebuah hotel besar di Gili Trawangan di bagian *housekeeping*. Kontrak pertamanya hanyalah status DW (*daily worker*) atau pekerja harian lepas. Setelah satu tahun, barulah Bang Redi mendapatkan kontrak sebagai karyawan. Baginya, pekerjaan di hotel dan lingkungan Gili Trawangan sempat membuat banyak orang termasuk dirinya menjadi apatis dan hanya mementingkan uang.

Pernah ada tamu seorang artis terkenal dari ibu kota bilang ke saya, “Kok orang sini sombong-sombong ya, *nggak* ada yang ajak foto”. Ya, orang di sini tidak butuh foto dengan artis, yang mereka butuhkan uangnya. Kamu ada uang, kami siap kasih jasa (Wawancara Bang Redi, 4 November 2022).

Kisah Bang Redi ini memperlihatkan bahwa di Gili Trawangan komodifikasi yang dieksploitasi tidak hanya pada wujud fisik, tetapi juga ruang sosial (Hall, 2012). Marx (1867) mengungkapkan bahwa akumulasi-akumulasi modal yang mendatangkan keuntungan terjadi di ruang-ruang fisik, seperti akumulasi lahan. Derek Hall (2012)



Foto: Rudy (2022)

Gambar 3.8 Bang Redi

melakukan tinjauan ulang terhadap konsep akumulasi primitif Marx dimana menurutnya pada konteks sekarang ruang-ruang interaksi sosial antar manusia pun dinilai dengan keuntungan langsung, dan ruang nonfisik ini menjadi lahan baru untuk diakumulasi. Interaksi dan relasi sosial bagi banyak orang di Gili Trawangan tidak dirasa menarik jika dianggap tidak mendatangkan keuntungan langsung.

Serupa dengan yang dialami Bang Anto, rupanya gempa Lombok 2018 menjadi titik balik dalam sejarah hidup Bang Redi. Pasca gempa, Bang Redi dirumahkan sembari menunggu pemulihan pariwisata Lombok. Akan tetapi, belum sempat kembali bekerja, bencana pandemi COVID-19 datang melanda. Bang Redi terpaksa kerja serabutan selama empat tahun terakhir. Redi sering kali mendapat tawaran pekerjaan pendataan dari ayahnya yang ketua RT dan saudara iparnya yang kepala dusun, Salah satu pekerjaan yang paling besar adalah Sensus Penduduk Long Form, yang kemudian membawanya ke Regsosek 2022 ini. Awalnya, Bang Redi ditawarkan menjadi petugas ke Gili Air, tetapi pada akhirnya dipindahkan ke Gili Trawangan karena kurangnya petugas di sana. Bang Redi mengaku bahwa orang BPS Kabupaten tidak tahu bahwa beliau pernah bekerja di Gili Trawangan dan akhirnya ditempatkan di sana.

Lebih susah warga yang ekstrem (tidak ramah dan menolak wawancara) daripada lingkungan alam yang ekstrem. Kalau lingkungan alam ekstrem cuma *capek* tenaga saja. Kalau warga ekstrem ini sudah *capek* tenaga, *capek* hati pula. Ada warga yang ekonomi menengah ke atas, tetapi menolak diwawancarai, [tetapi] mereka mau kalau terkait bantuan. Yang dipermasalahkan masalah sumbangan, itu alasan mereka tidak mau didata. Kata mereka: “didata atau tidak didata, saya tidak dapat apa-apa kan”. Inilah perjuangan kita (Wawancara Bang Redi, 4 November 2022).

Jika Bang Anto dan Bang Redi berasal dari pinggir di Desa Menggala dan bersuku bangsa Sasak, berbeda lagi dengan Bang Wawan (32 tahun) yang masa kecilnya berkali-kali pindah domisili. Bang Wawan (Gambar 3.9) berasal dari Desa Medana di Kecamatan Tanjung, lahir dari ayah keturunan Bugis-Mandar dan ibu asli Sasak. Bang Wawan pertama-tama bersekolah SD di Tanjung, kemudian pindah ke Tembobor, dan pada kelas 3 pindah ke Gili Trawangan mengikuti orang tuanya yang membuka usaha di sana. Memori masa kecilnya lebih banyak ia ingat di Gili Trawangan sehingga masih banyak orang-orang yang ia kenal, tidak terkecuali kerabat dan keluarga jauh. Selepas SMP, Bang Wawan pindah kembali ke *pinggir* untuk menempuh pendidikan Madrasah Aliyah. Setelah me-



Foto: Rudy (2022)

Gambar 3.9 Bang Wawan

namatkan pendidikan menengah atas, Bang Wawan memutuskan kembali ke Gili Trawangan untuk bekerja. Bang Wawan menjadi Bro atau pekerja lepas di jalanan yang menawarkan berbagai jasa wisata kepada turis, seperti menjadi pemandu wisata, pemandu selam, dan lain sebagainya. Bang Wawan menghabiskan waktu selama setahun di jalanan Gili Trawangan hingga pamannya mengajak untuk bekerja di suatu resort wisata. Bang Wawan kemudian bekerja di resor tersebut pada bagian dapur.

Satu lagi nasib anak manusia yang dihempas oleh gempa Lombok. Bang Wawan kehilangan pekerjaan dan akhirnya kembali ke rumahnya di Medana. Bang Wawan mengerjakan banyak hal, mulai dari kerja di bengkel mobil, las, hingga proyek bangunan. Perjumpaan pertamanya dengan pendataan dimulai dari Sensus Penduduk Long Form sebagai petugas di Desa Malaka, tepatnya di Setangi di bagian gunung yang terpencil. Saat awal perekrutan petugas Regsosek 2022, Bang Wawan sempat diajak salah satu kawannya. Namun, Bang Wawan menolak karena saat itu sedang terikat dengan proyek bangunan di Gili Meno. Selepas proyek, ternyata masih ada slot kosong.

Awalnya saya minta ditaruh di gunung saja karena saya berkesan di sana. Inilah cara kami supaya warga itu kena pendataan. Biar jauh tetap kami datang. Uang kalau dihitung tidak besar, tetapi namanya pekerjaan tetap kami jalankan, apalagi kalau tujuannya membantu masyarakat yang membutuhkan (Wawancara Wawan, 4 November 2022).

Namun, Bang Wawan pada akhirnya ditempatkan di Gili Trawangan karena pernah berdomisili di sana. Selain itu, Bang Wawan juga menguasai bahasa Bugis-Mandar dan Sasak sehingga mampu melakukan pendekatan secara personal dengan warga Gili Trawangan. Kisah hidup dari tiga orang PPL tadi dapat memberikan gambaran bahwa kepedulian akan pendataan kependudukan bukan sekadar ada pada para pejabat pemerintah, para akademisi, maupun berbagai pemangku kebijakan terkait. Mereka yang mengaku sebagai “orang biasa” dari desa, yang bekerja secara serabutan dan tidak mengenyam

pendidikan perguruan tinggi, ternyata memiliki kepedulian yang sangat besar terhadap perkara pendataan kependudukan. “Uang tidak masalah, jauh dari rumah, yang penting niat ikhlas membantu yang membutuhkan dengan mendata secara benar”, itulah yang menjadi landasan mereka dalam menjalankan tugas.

G. Kisah Hidup Keluarga Terdata

“Kalau perangkat desa seperti kepala dusun atau ketua RT itu paling gampang untuk dicacah, karena mereka sering ada di tempat, dicari pun tidak sulit”, ungkap seorang PPL. Kehadiran perangkat pemerintahan lokal yang tidak sukar ditemui ini pun menjadi harapan bagi para PPL untuk meneruskan pendataan ke warga mereka. Kepala dusun dan ketua RT apabila diperlukan akan menjadi jembatan penghubung antara PPL dan warga yang akan didata.

Setibanya di lokasi pendataan, petugas langsung menuju rumah kepala dusun yang terletak di permukiman belakang Masjid Utara. Berbeda dengan rumah-rumah lain yang sebagian besar berwujud modern dengan bahan bangunan beton, rumah kepala dusun yang masih berbentuk rumah tradisional suku Sasak berupa rumah panggung yang terbuat dari kayu dan bambu. Hanya atap rumah saja yang telah berganti dari anyaman jerami menjadi seng.



Foto: Rudy (2022)

Gambar 3.10 Pak Husni

Kepala dusun ini bernama Bapak Husni (Gambar 3.10) yang ditemui petugas pendata di rumahnya. Perawakannya yang tegap dan raut muka masih nampak sangat muda. Bapak Husni berusia 32 tahun dan terpilih menjabat sebagai Kepala Dusun Gili Trawangan pada usia yang terhitung muda, yakni 29 tahun. Bapak Husni terhitung sebagai generasi kedua “penduduk asli” Gili Trawangan. Ayahnya yang berasal dari Tanjung pertama kali ke pulau kecil ini pada awal dekade 1970-an, bekerja di kebun dan memetik kelapa.

Awalnya ayah saya berkebun, tetapi pulang-pergi ke pinggir. Pertama kali akhirnya menetap itu tahun 1979, waktu itu belum banyak rumah di sini dan semua warga kerja berkebun. Kakek saya juga akhirnya dibawa ayah saya untuk menetap di sini (Wawancara Pak Husni, 5 November 2022).

Beliau lahir di Gili Trawangan dan menghabiskan masa kecil di pulau ini hingga selesai menempuh pendidikan SD. Bapak Husni dikirimkan orang tuanya untuk menempuh pendidikan di pesantren di Lombok Barat karena belum adanya sekolah menengah saat itu. Selepas pesantren, Bapak Husni berkuliah di Kota Mataram dan menyelesaikan pendidikan sarjana sosial ekonomi pertanian.

Beberapa tahun setelah selesai kuliah pada 2013, Bapak Husni mendapat tawaran dari kakaknya untuk mengelola kafe di pantai Gili Trawangan. Awalnya, beliau ingin melanjutkan pendidikan S2, tetapi timbul keinginan dirinya untuk bekerja sehingga tidak lagi bergantung pada orang tua. Setelah beberapa tahun mengelola kafe tersebut, terjadi pengusuran oleh pemerintah daerah karena kawasan pantai tidak boleh tertutup oleh bangunan. Bapak Husni perlahan mencoba membangun usahanya sendiri dengan mendirikan agen wisata. Bapak Husni mengikuti seleksi pansel pemilihan kepala dusun pada tahun 2019 di Kecamatan Pemenang. Bapak Husni kemudian terpilih dan menjabat hingga saat ini. Bapak Husni mengaku mendapat dukungan dari beberapa tetua kampung untuk maju menjadi kepala dusun. Bapak Husni menjelaskan suka duka menjadi pemimpin muda:

Luar biasa betul mengurus masyarakat dalam konteks Gili Trawangan ini, kalau masyarakat biasa ya ndak masalah. Ini pengusaha. Belum lagi pengusaha besar ini *backing* orang besar juga, ya sulit lah, banyak yang tidak ikut aturan. Kita sudah buat aturan ini, awik-awik adat ini, tetap kalau berhadapan dengan *backing* orang besar ya kalah kita, apalagi kita masih baru ini (Wawancara Bapak Husni, 4 November 2022).

Bapak Husni mengaku lebih nyaman bermitra dengan Warga Negara Asing (WNA) ketimbang saudara sebangsa sendiri karena, menurutnya, WNA ini lebih taat dengan aturan lokal yang berlaku. Bapak Husni memandang pendataan kependudukan sangat krusial di Gili Trawangan karena betapa carut-marutnya perkara kependudukan di pulau kecil ini.

Berdasarkan jumlah warga yang tercatat, hanya separuh dari jumlah keseluruhan warga yang menetap di pulau ini. Warga yang sudah meninggalkan Gili Trawangan pun ada yang tetap memiliki bisnis di Gili Trawangan. Warga yang menempati Gili Trawangan memang didominasi oleh para pendatang yang terdiri dari pekerja wisata dan wisatawan. Perkaranya ialah banyak pekerja wisata yang tinggal di Gili Trawangan, tetapi tidak melapor kepada ketua RT setempat sehingga tidak terdata. Ketua RT menerangkan bahwa pekerja lepas yang sering pulang-pergi tidak sempat beliau kenali wajahnya karena sebelum mengenal namanya, orang tersebut sudah pergi, dan baru kembali beberapa bulan kemudian. Wisatawan juga banyak yang menetap lama, bahkan ada yang berbulan-bulan hingga menahun. Warga akhirnya ada yang tercatat dan ada yang tidak.

Tidak semua orang di sini menikmati kekayaan dari pariwisata. Yang tercatat saja paling tidak ada 20 keluarga kurang mampu di sini, itu belum yang tidak saya ketahui atau tercatat. Karena di sini sulit sekali mendapatkan data yang akurat. Orang datang dan pergi, sering berpindah rumah, jarang yang melapor ke

perangkat, ya begitu sudah, semua memikirkan diri sendiri (Wawancara Bapak Husni, 3 November 2022).

Penuturan Bapak Husni, “paling tidak ada 20 keluarga kurang mampu” yang kemudian membawa peneliti pada dua keluarga yang tersisih dan terpinggirkan dari kontestasi berebut kekayaan di pulau impian ini. Kedua perempuan lanjut usia ini telah memasuki usia kepala tujuh, namun masih tetap gigih bekerja untuk menyambung hidup mereka di pulau yang telah mereka tempati selama lebih dari separuh usia mereka.

Siang itu, perjalanan ke arah tengah pulau didampingi oleh Pak Husni dan para PPL. Makin ke tengah pulau, makin sedikit bangunan wisata yang terlihat, makin padat pula perumahan warga. Selepas lapangan, terlihat kawasan yang cukup kumuh. Banyak sampah botol plastik yang menutupi jalan, hingga akhirnya tiba pada satu rumah petak yang dihuni oleh seorang janda tua.

“*Dolar niku jadi dolar, kerjaan saya... tahu nama dolar itu?*”, ujar Nenek Kemasin sambil tertawa memperlihatkan gigi-giginya yang sudah tidak lengkap. Ia tidak malu menceritakan pekerjaannya memulung sampah botol yang ia sebut sebagai “dolar”. Empat orang duduk berhimpit di teras rumah petaknya yang cukup sempit. Hanya Nenek Kemasin, Pak Husni, dan tim peneliti saja yang muat, sementara para PPL berdiri di depan rumah petak tersebut. Nenek Kemasin hidup bersama anak laki-laki, menantu, dan cucunya di rumah seluas 3×5 meter ini selama bertahun-tahun. Namun, beberapa bulan lalu, anaknya sekeluarga memutuskan untuk pindah ke rumah petak lain di bagian selatan pulau sehingga sekarang Nenek Kemasin hidup sendirian di rumah petaknya (Gambar 3.11). Sekarang, ia harus menanggung biaya sewa sebesar Rp500 ribu per bulan. Nominal yang baginya cukup berat karena selama pandemi COVID-19 sampai sekarang penghasilan dari memulung sampah botol turun drastis karena berkurangnya wisatawan. Ia hanya mendapatkan Rp500 ribu untuk satu kali menjual kepada pengepul, dan dalam satu bulan biasanya ia hanya dua kali menjual saja.



Foto: Rudy (2022)

Gambar 3.11 Nelek Kemasin

Ia tidak ingat dengan pasti kapan pertama kali ia pindah dan menetap di Gili Trawangan. “Waktu awal pindah, suami sudah lama meninggal, saya pindah jadi pengasuh anak. Sudah ada bule di sini...” ujarnya. Menurut perkiraan Pak Husni, Nelek Kemasin menetap di Gili sekitar dekade 1980-an atau awal 1990-an ketika awal pariwisata menggeliat di pulau ini. Meskipun lupa kapan persisnya pindah ke Gili Trawangan, ia masih ingat kampungnya di Karangnangka di Kecamatan Tanjung, meskipun sudah tidak mempunyai rumah lagi di sana. Selama di Gili Trawangan, ia telah melakoni pekerjaan membantu di kebun orang lain, kemudian dilanjutkan memulung sampah botol selama bertahun-tahun. Penghasilannya hanya cukup untuk mengontrak rumah petak saja sehingga hingga di usia senjanya sekarang ia masih belum memiliki tanah dan rumah sendiri walaupun sudah resmi berstatus sebagai warga Gili Trawangan.

Saya keluar pagi-pagi keliling, kalau malam tadi ada pesta ya syukur saya dapat banyak botol. Kalau tidak ada seperti sekarang ya dari rumah-rumah saja. Kalau siang saya pulang istirahat, setelah makan saya jalan lagi sampai sore (Wawancara Nelek Kemasin, 4 November 2022).

Nenek Kemasin menjawab semua pertanyaan kami dengan senyum dan tawa, meskipun terdapat bagian sedih seperti ketika ditinggal pergi oleh anak laki-lakinya yang pindah.

“Apakah pernah didata? Apakah pernah mendapat bantuan?”, begitu pertanyaan peneliti. Ia mengaku pernah keduanya tetapi ia tidak tahu pendataan apa dan bantuan apa. Pak Husni membantu menjelaskan bahwa Nenek Kemasin pernah mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa ketika pandemi COVID-19 yang lalu. Menurutnya, BLT Dana Desa ini terutama ditujukan kepada mereka yang kurang mampu yang tidak mendapatkan Bantuan Sosial Tunai (BST) dari pusat karena datanya tidak masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pihak desa sadar bahwa ada ketidaktepatan data yang ada di pusat sehingga mereka melakukan intervensi dari Dana Desa untuk keluarga tidak mampu yang luput dari data di pusat sana.



Foto: Rudy (2022)

Gambar 3.12 Nenek Rupinah dan Keluarga

Tidak hanya Nenek Kemasin, masih banyak warga kurang mampu lain yang luput dari data pusat ini. Nenek Rupinah misalnya (Gambar 3.12) memperlihatkan situasi ruang tempat tinggalnya. Perempuan

lanjut usia yang tidak dapat berbahasa Indonesia ini tinggal di rumah panggung kumuh berukuran 3×5 m yang ironisnya berada di belakang beberapa hotel dan vila mewah. Di sebelah rumahnya, terdapat sebuah rumah berukuran hampir sama yang dihuni oleh anak laki-laki, menantu, dan cucunya. Nenek Rupinah sehari-hari bekerja sebagai buruh tani di kebun milik orang lain, sekadar membantu mengumpulkan panen buah dengan penghasilan Rp25 ribu hingga Rp50 ribu per hari. Itupun tidak dilakukan setiap hari, hanya ketika panen saja.

Peneliti agak kesulitan berkomunikasi dengan Nenek Rupinah karena ia hanya mampu berbahasa Sasak. Komunikasi dibantu oleh Bang Wawan dan Bang Anto yang menjadi penerjemah. “Ina Rupinah ini tidak tahu usia aslinya, tetapi yang tercatat sekitar 70-an tahun, sudah lama sekali di pulau ini, dulu pindah dari Pemenang ke sini dengan keluarganya,” ucap Bang Anto menerjemahkan cerita Nenek Rupinah. Ia ingat pertama kali pindah ke sini ketika masih banyak orang berkebun dan belum ada wisatawan, yang kami taksir sekitar dekade 1970-an. Ia dan suaminya bekerja kebun kemudian menjadi buruh pelabuhan. Dulu mereka tinggal di dekat pesisir pantai, tetapi kemudian tergusur ke tengah pulau karena ketidakjelasan status pertanahan di pulau ini. Sekarang, ia mengaku tanah yang ia tempati adalah miliknya, tetapi ia mengaku tidak mempunyai bukti legal. Di tengah obrolan, anak laki-lakinya datang dan membantu untuk bercerita. “Jadi, ini tanah ibu, tetapi memang tidak ada sertifikat. Kemarin ada Menteri Agraria datang menjanjikan bagi-bagi sertifikat, tetapi sampai sekarang belum ada kabar lagi,” ujarnya dengan nada yang tidak bersemangat. Jangankan untuk membantu kehidupan ibunya, ia sendiri mengaku kesulitan untuk menafkahi keluarganya dari pekerjaan memulung barang rongsokan.

Kisah kedua perempuan lanjut usia yang boleh dikatakan sebagai “penduduk awal” Gili Trawangan ini menjadi ironi yang sangat terasa pahit. Mereka adalah orang-orang yang datang di awal, tetapi mereka menjadi korban “hutan belantara dolar” di pulau ini. Penyingkiran melalui proses akumulasi primitif ini bukan hal yang baru, Marx

(1867) telah membicarakan ini 1,5 abad silam tatkala revolusi industri berlangsung di Eropa. Mereka tersingkir dan hanya dapat bertahan hidup dari sisa-sisa tetesan rezeki yang membasahi pulau impian. Di rumah sendiri mereka tersingkir, di data pusat pun mereka tidak ditemukan. Mereka tidak tercatat sebagai penerima program nasional BST selama masa pandemi COVID-19. Mereka hanya menerima BLT Dana Desa sebagai rencana cadangan bagi orang-orang yang seolah dilupakan oleh data pusat. Terdatanya mereka dalam Regsosek ini memberikan secercah harapan terhadap perbaikan data nasional yang terintegrasi.

H. Penutup: Sebuah Refleksi

Kompleksitas proses produksi data yang ada di Lombok Utara menggambarkan bahwa imaji desa sebagai suatu entitas yang homogen dan tenteram tidaklah selalu tepat. Banyaknya uang yang beredar, tingginya pendapatan rata-rata, dan kepopuleran nama tidak berarti semua orang sejahtera. Di balik gemerlapnya pesona pariwisata, ada mereka yang tersisih, hidup “tak terlihat” di pedalaman pulau. Di antara mereka yang meraup untung, banyak yang tersebar tak sesuai dengan apa yang tercatat. Gili Trawangan ada pada sebuah kawasan perdesaan yang penuh dinamika, konflik, dan mobilitas yang seakan tak pernah berhenti. Diferensiasi ekonomi dan etos kerja individualisme yang mewarnai keseharian penduduk menyebabkan proses pencacahan tidak sesederhana yang diajarkan saat pelatihan. Sulitnya menemui dan meminta kesediaan responden untuk diwawancarai adalah tantangan terbesar dalam mewujudkan keakuratan data.

Tantangan pendataan seperti di atas membutuhkan sentuhan “lokal” sebagai modal awal untuk mengatasinya. Lokalitas ini tidak berarti petugas lapangan harus berasal dari wilayah tersebut, namun paling tidak menguasai medan lapangan, mengenal banyak orang setempat terutama tokoh masyarakat, hingga menguasai bahasa tempatan. Posisi petugas lapangan yang ada di antara (*in-between*), bukan merupakan penduduk tempatan dan bukan pula orang yang benar-benar asing, membuat mereka berada pada posisi ideal. Petugas

lapangan tidak rawan terjebak pada bias lokalitas dan tetap profesional dalam menjalankan tugas.

Sebagai sebuah refleksi, pengalaman dan pembelajaran yang didapatkan di Gili Trawangan, sebuah pulau impian nan gemerlap ini, menyadarkan bahwa berbagai proyek besar, entah itu proyek pembangunan atau pendataan seperti Regsosek 2022 ini, baiknya tidak hanya terjebak pada angka-angka statistik saja. Bilangan yang berjejer di dalam grafik dan tabel harus diberi “roh kemanusiaan”, berupa narasi emik dari orang-orang lemah—jika boleh meminjam istilah Scott (1985). Narasi-narasi ini yang ujar Holloway (2010) dapat menjadi salah satu wujud terbangunnya kesadaran mereka yang lemah, yang bangkit dengan segala kelokalan masing-masing membuat retakan-retakan kecil pada tembok besar yang membelenggu mereka. Pemangku kebijakan tidak seharusnya memosisikan diri sebagai ahli yang tahu bagaimana orang lain harus hidup (Easterly, 2014), pun tidak semestinya mengumpulkan dan mengatur data dengan proses penyederhanaan realitas (Scott, 1998) layaknya ucapan Stalin, *“kematian satu orang adalah tragedi, kematian jutaan orang hanyalah statistik”*. Satu atau sejuta kematian, semua adalah tragedi, semua memiliki makna, suara, dan kisah tersendiri di baliknya.

Kerja keras semua pihak yang terlibat mulai dari BPS dari berbagai tingkat, para petugas lapangan, para perangkat desa, para warga masyarakat yang turut membantu, hingga para responden yang bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai memberikan pelajaran bahwasanya Regsosek ini bukanlah hanya hajatan pemerintah saja. Regsosek merupakan hajatan besar semua elemen manusia Indonesia, baik yang merasa ada di “atas” maupun di “bawah” dengan segala cerita uniknya masing-masing. Pencacahan jiwa penting dilakukan sebagai salah satu dasar kebijakan. Ketepatan data perlu dicapai demi mewujudkan kesejahteraan. Namun kemudian, tentu “roh kemanusiaan” harus hadir agar angka-angka ini dapat berbicara demi keberpihakan pada mereka yang membutuhkan.

Daftar Pustaka

- BPS Kabupaten Lombok Utara. (2022a). *Kecamatan Pemenang dalam angka 2022*. BPS Kabupaten Lombok Utara.
- BPS Kabupaten Lombok Utara. (2022b). *Potret pariwisata Kabupaten Lombok Utara 2022*. BPS Kabupaten Lombok Utara.
- BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat. (2022). *Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam angka 2022*. BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Breman, J. (1980). *The Village on Java and early-colonial state*. CASP at Erasmus University.
- Dodds, R., Graci, S. R., & Holmes, M. (2010). Does the tourist care? A comparison of tourists in Koh Phi Phi, Thailand and Gili Trawangan, Indonesia. *Journal of Sustainable Tourism*, 18(2), 207–222. <https://doi.org/10.1080/09669580903215162>
- Easterly, W. (2014). *The tyranny of experts: Economists, dictators, and the forgotten rights of the poor*. Basic Books.
- Ferguson, J. (1990). *The anti-politics machine: Development, depoliticization and bureaucratic power in Lesotho*. Cambridge University Press.
- Foucault, M. (1980). *Power/knowledge: Selected interviews and other writings, 1972–1977*. Knopf Doubleday Publishing Group.
- Hall, D. (2012). Rethinking primitive accumulation: Theoretical tensions and rural Southeast Asian complexities. *Antipode*, 44(4), 1188–1208. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8330.2011.00978.x>
- Hampton, M. P., & Hampton, J. M. (1998). *Tourism and the environment in small islands: a case study of Gili Trawangan, Lombok, Indonesia* [Discussion Paper]. Department of Economics, University of Portsmouth
- Hampton, M. P., & Hampton, J. M. (2009). Is the beach party over? Tourism and the environment in small islands: A case study of Gili Trawangan, Lombok, Indonesia. In M. Hitchcock, V. T. King, & M. Parnwell (Eds.). *Tourism in Southeast Asia: Challenges and New Directions* (286–308). NIAS Press.
- Hardin, G. (1968). The tragedy of the Commons. *Science*, 162(3859), 1243–1248. <http://www.jstor.org/stable/1724745>
- Harris, M. (1979). *Cultural materialism: The struggle for a science of culture*. Random House.

- Holloway, J. (2010). *Crack capitalism*. Pluto Press.
- Li, T. M. (2005). Beyond “the State” and failed schemes. *American Anthropologist*, 107(3), 383–394. <https://doi.org/10.1525/aa.2005.107.3.383>
- Li, T. M. (2007). *The will to improve: Governmentality, development, and the practice of politics*. Duke University Press. <https://doi.org/10.1215/9780822389781>
- Marx, K. (1867). So-Called Primitive Accumulation. In Capital Volume I. Penguin Books.
- Partelow, S. (2021). Social capital and community disaster resilience: post-earthquake tourism recovery on Gili Trawangan, Indonesia. *Sustainability Science*, 16(1), 203–220. <https://doi.org/10.1007/s11625-020-00854-2>
- Ross, M. L. (1999). The political economy of the resource curse. *World Politics*, 51(2), 297–322. <https://doi.org/10.1017/S0043887100008200>
- Scott, J. C. (1985). *Weapons of the weak: Everyday forms of peasant resistance*. Yale University Press. <https://www.jstor.org/stable/j.ctt1nq836>
- Scott, J. C. (1998). Seeing like a State: How certain schemes to improve the human condition have failed. Yale University Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctvxkn7ds>
- Segev, E. (2019). Volume and control: The transition from information to power. *Journal of Multicultural Discourses*, 14(3), 240–257. <https://doi.org/10.1080/17447143.2019.1662028>
- Tishkov, V. (2005). The population census and the construction of identity. *Anthropology & Archeology of Eurasia*, 44(2), 10–40. <https://doi.org/10.1080/10611959.2005.11029024>
- TNP2K. (2022). Direction of the President of the Republic of Indonesia Regarding Targeted Data for the Acceleration of the Elimination of Extreme Poverty (P3KE). [https://www.tnp2k.go.id/articles/direction-of-the-president-of-the-republic-of-indonesia-regarding-targeted-data-for-the-acceleration-of-the-elimination-of-extreme-poverty-p3ke#:~:text=Luhut menyampaikan kemiskinan dan kemiskinan,atau 27%2C57 juta jiwa](https://www.tnp2k.go.id/articles/direction-of-the-president-of-the-republic-of-indonesia-regarding-targeted-data-for-the-acceleration-of-the-elimination-of-extreme-poverty-p3ke#:~:text=Luhut%20menyampaikan%20kemiskinan%20dan%20kemiskinan,atau%2027%2C57%20juta%20jiwa)
- Tukiran, T. (2000). Sensus penduduk di Indonesia. *Populasi*, 11(1), 17–34. <https://doi.org/10.22146/jp.12328>